

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUJAHID FADLIL, S.SOS.MSI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 422656

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 985.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/141 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.500.000

1. MOBIL, TOYOTA SOLUNA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA GLP II Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ----**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.145.500.000**III. HUTANG** Rp. 93.601.918**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.051.898.082

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.